

UPAYA PEMERINTAH ALI ABDULLAH SALEH MENYELESAIKAN KONFLIK DENGAN PEMBERONTAK AL HOUTHİ

The Efforts of Ali Abdullah Saleh's Government to Resolve Conflict With The Rebel of Al Houthi

Gilang Prabowo Jakti, Alfam Jamil

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: gierzprab@gmail.com jamilalfan@yahoo.com

Abstract

On May 22, 1990, North Yemen and South Yemen finally united. The unification between North Yemen and South Yemen is expected to be a country that is strong, prosperous and developed. However, as time went by, internal conflicts in the country of Yemen occurred. A group named The Rebel Al Houthi in northern Yemen that was precisely in the province of Sa'ada began a rebellion against the Yemeni government leader Ali Abdullah Saleh. The beginning of insurgency by Rebel Al Houthi was due to dissatisfaction with the government of Yemen leader Ali Abdullah Saleh who was more inclined to the United States and made discrimination and economic marginalization of the population in northern Yemen. The purpose of this research was to investigate and examine the efforts made by the Government of Yemen leader Ali Abdullah Saleh in the face of the Rebel Al Houthi. The method used was qualitative research. The research used descriptive method that will explain an event by considering the conclusion as a logical consequence of the existing problems. Ali Abdullah Saleh's government had made various efforts in dealing with the Rebel Al Houthi group by either military or peace-making approach. However, negotiations carried out also often failed because of mutual distrust between the two sides that led to the violation of the points that had been agreed until finally both sides agreed to a ceasefire by asking other countries to become a mediator.

Keywords: Al Houthi, discrimination, conflict resolution, Ali Abdullah Saleh, Yemen

Pendahuluan

Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, yang merupakan bagian dari

Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Arab Saudi disebelah utara, Laut Arab di sebelah selatan, Oman di sebelah timur dan Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat. Jumlah penduduk

Yaman adalah sebanyak 23 juta jiwa. Luas negara Yaman sekitar 530.000 km² dan wilayah di Yaman meliputi lebih dari 200 pulau. Yaman sebelum tahun 1982 terpisah menjadi 2 negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Melihat lebih dominannya persamaan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan maka pada tanggal 22 Mei 1990 (Husen, 2009). Yaman Utara dan Yaman Selatan akhirnya bersatu. Sejak saat itu pula Ali Abdullah Saleh diangkat menjadi presiden baik di Yaman Utara maupun Yaman Selatan. Dari adanya penyatuan tersebut diharapkan dapat diwujudkan suatu negara yang integral dan sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini ternyata di Yaman sering terjadi konflik, terutama konflik antara Pemerintah pusat Yaman dengan pemberontak Al Houthi di Yaman Utara.

Pemberontak Al Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Para pengikut pemberontak ini terkenal dengan sebutan Houthis. Penamaan ini berdasarkan pencetusnya yaitu Husein Badaruddin Houthi. Husein Al Houthi adalah anak Alamah Sheik Badruddin Al Houthi yang merupakan seorang tokoh Syi'ah Zaidiyah di Yaman. Karir politiknya dimulai sebagai salah seorang pendiri partai Al Haq yang lebih berpandangan terhadap Islam. Ketika pada tahun 1991 partai sosialis berkuasa di Yaman, partai Al Haq yang pandangannya berdasarkan Islam dibentuk untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim Partai Asosiasi Reformasi Yaman. Ketika pada tahun 1996 banyak warga Yaman yang beraliran Wahabi

dari Afganistan kembali ke Yaman, mulai terjadi perpecahan dan pertentangan di dalam tubuh pemerintah Yaman. Dengan maksud untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim dan keras tersebut, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Husein Al Houthi (Taufik, 2009).

Pada tahun 1997 Husein Al Houthi keluar dari Partai Al Haq dan membentuk Gerakan Al Syabab Al Mukmin (gerakan Pemuda Mukmin). Saat itu pemerintah masih memberikan bantuan kepada gerakan yang didirikan oleh Husein Al Houthi ini, akan tetapi semua itu berubah ketika pada tahun 2003 sekitar 650 anggota Gerakan Al Syabab Al Mukmin ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara akibat menyerukan slogan yang menghina dan menjelekkan Amerika Serikat dan Israel. Dimulai dari peristiwa itulah hubungan antara Gerakan Al Syabab Al Mukmin dengan pemerintah menjadi tidak harmonis. Pemerintah sendiri awalnya menekan gerakan ini melalui jalur politik, akan tetapi lama kelamaan tekanan tersebut mulai menggunakan militer dan hal tersebut terus berlangsung. (Steven, 2009).

Pada Juni 2004 Pemerintah Yaman akhirnya menawarkan hadiah sebesar 55.000 USD bagi siapa yang berhasil menangkap Husein Al Houthi. Hal tersebut merupakan taktik dari Pemerintah Yaman untuk meredam intensitas aksi protes dan pemberontakan yang dipimpinnya. September 2004 Menteri Pertahanan Yaman mengumumkan bahwa Husein Al Houthi telah tewas oleh militer Yaman di pegunungan sekitar Sa'adah. Setelah kematian Husein Al Houthi tersebut, hingga

sekarang Pemberontak Al Houthi dipimpin oleh adik kandungnya yakni Abdul Malik Al Houthi.

Pemberontakan Al Houthi kembali meletus sekitar Juni hingga Oktober 2009. Pemberontakan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Husein Al Houthi pada tahun 2004. Pemerintah Yaman di selatan menuding kelompok Pemberontak Al Houthi ingin menggulingkan sistem pemerintahan yang ada sekarang dan menggantinya dengan sistem imamah. Sedangkan kelompok Pemberontak Al Houthi yang mendapat dukungan dari penduduk di Yaman Utara menuduh Pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan marginalisasi ekonomi di kawasan Sa'adah. Dari sinilah Pemerintah Yaman mulai mengecam tindakan Kelompok Pemberontak Al Houthi hingga melancarkan serangan – serangan terhadap pihak pemberontak. Selain itu, konflik juga terus berlanjut ketika pihak Kelompok Pemberontak Al Houthi tidak senang dengan sikap Pemerintah Yaman yang mendukung Amerika Serikat dan Israel dalam memberantas terorisme (Amir, 2012).

Presiden Ali Abdullah Saleh ternyata juga tidak tinggal diam dalam menghadapi dan meredam kelompok Pemberontak Al Houthi tersebut. Pihak pemerintah mulai memerintahkan untuk melakukan tindakan – tindakan militer terhadap kelompok Pemberontak Al Houthi seperti “Operasi Bumi Hangus (*Scorched Earth*)” pada tanggal 11 Agustus 2009. Pemerintah mengerahkan sekitar 60.000 tentara dan juga beberapa pesawat tempur untuk menyerang basis –

basis pertahanan para pemberontak bahkan Pemerintah Arab Saudi juga ikut membantu Pemerintah Yaman dalam menghadapi kelompok Pemberontak Al Houthi tersebut (Husen, 2009). Dari serangan yang dilakukan oleh Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh tersebut, setidaknya sekitar 100 lebih anggota kelompok Pemberontak Al Houthi tewas akibat serangan bom dan pesawat tempur milik Pemerintah Yaman.

Pertempuran antara Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dengan kelompok Pemberontak Al Houthi ini berlangsung selama berhari – hari yang menimbulkan kerugian dan korban jiwa yang cukup besar utamanya dari pihak Pemberontak Al Houthi (Izzudin, 2011). Berdasarkan data dari Palang Merah Internasional, sebanyak kurang lebih 30.000 jiwa warga sipil Yaman menjadi terlantar. Sejak pemberontakan yang dilakukan oleh Al Houthi antara tahun 2004 – 2009, jumlah total korban tewas sekitar 1.000 orang dan 150.000 jiwa lainnya terlantar. Sedangkan menurut situs resmi yang dimiliki Yaman, jumlah korban tewas mencapai 5.000 orang dan 500.000 lainnya mengungsi (Steven, 2009).

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dalam membangun perdamaian dengan kelompok Pemberontak Al Houthi.

Landasan Konseptual

Berkaitan dengan kerangka dasar pemikiran, penulis mencoba menganalisis upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dalam menghadapi kelompok Pemberontak Al Houthi menggunakan konsep dasar negosiasi dan teori resolusi konflik. Teori resolusi konflik digunakan untuk menentukan dan menganalisa bagaimana tingkat eskalasi konflik yang terjadi dapat dikurangi dan kepentingan dari pihak – pihak yang bersengketa dapat diakomodasi menuju proses perdamaian.

Konsep Negosiasi

Konsep Negosiasi adalah usaha untuk menyatukan kepentingan yang berbeda – beda. Dengan negosiasi, melalui proses saling memberi dan menerima membuat kompensasi yang sesuai dan disetujui bersama agar terpenuhi keinginan masing – masing. Jika kedua belah pihak telah memutuskan untuk berunding maka pada akhirnya akan sampai pada saat tawar menawar rincian khusus penyelesaiannya (Morgenthau,1978:206) Demi keberhasilan negosiasi masih diperlukan syarat lain yaitu seimbang posisi tawar – menawar kedua belah pihak, dan hasil perundingan pragmatis dapat dilaksanakan serta dapat menjamin masa depan pihak – pihak yang berunding. Hal ini adalah wajar dimana konflik dapat diselesaikan dengan perundingan yang hasilnya dapat memuaskan kedua belah pihak yang bertikai baik secara material maupun spiritual.

Konsep Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang mengakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini kemudian berakibat pada tidak adanya tindakan kekerasan yang membahayakan dan struktur konflik telah dirubah. Terminology resolusi konflik melihat perdamaian sebagai proses terbuka dan digunakan untuk menentukan kerangka aksi penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik (Miall,2000:30-31)

Salah satu bentuk resolusi konflik adalah adanya suatu bentuk akomodasi terhadap pihak – pihak yang bertikai dimana bentuk – bentuk akomodasi tersebut yaitu:(Darby,2003:33-34)

1. Gencatan Senjata

Yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya saja; untuk melakukan perawatan bagi yang luka – luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain – lain.

2. Arbitrasi

Yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali dimana saja di masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.

3. Mediasi

Yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Misalnya saja; PPB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Malaysia.

4. Konsiliasi

Yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak – pihak yang berselisih sehingga tercapai kesepakatan bersama. Misalnya; panitia tetap menyelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemen Tenaga Kerja, bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari – hari libur, dan lain – lain.

5. Stalemate

Yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik dimana untuk tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju maupun mundur. Misalnya saja; adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa perang dingin.

6. Adjudication

Yaitu penyelesaian perkara atau suatu sengketa di dalam pengadilan.

Pemerintah Yaman pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh sendiri berupaya untuk meredam konflik yang terjadi dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi. Pemerintah Yaman telah berupaya melakukan perundingan dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi dengan meminta bantuan Qatar sebagai mediator.

Hasil Penelitian

Strategi Kelompok Pemberontak Al Houthi Menghadapi Pemerintah

1) Sistem Komando, Kontrol dan Komunikasi Al-Houthi

Entitas Al-Houthi tidaklah terbentuk pada operasi tempur tahun 2004 dengan urutan pertempuran dan hirarki organisasi yang dapat dianalisis dari segi militer konvensional. Sebaliknya, kelompok ini muncul dari struktur, proses, dan nilai-nilai yang organik dari pegunungan, pedesaan, dan lingkungan yang mempunyai keberagaman suku. Hal ini penting guna mengetahui bahwa Al-Houthi bergerak memobilisasi masa menggunakan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari di tempat asal mereka.

Ketika pada tahun 2004 Hussain Al-Houthi terbunuh di tangan pasukan keamanan pemerintah, kelompok ini selanjutnya dipimpin oleh Allamah Badruddin Al-Houthi yang merupakan ayah dari Hussain Al-Houthi. Allamah Badruddin melanjutkan perjuangan sang anak guna melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan menjadi ukuran ideologi kelompok ini (Muhammad, 2014). Pada bulan Februari 2006 Allamah Badruddin Al-Houthi meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya dan tongkat estafet kepemimpinan digantikan oleh puteranya Abdel Malik Al-Houthi. Ada hal berbeda yang bisa di lihat dari cara kelompok Al-Houthi mempertahankan diri, yakni penempatan para pemimpin mereka. Husain Al-Houthi menjabat

sebagai komandan selama fase pertama, dengan Badr al-Din mengambil alih selama fase kedua. Adik Husain yakni Abd al-Malik telah mengambil alih kepemimpinan Al-Houthi dari fase ketiga pertempuran dan seterusnya memiliki perbedaan. Lokasi geografis dari penempatan para pemimpin Al-Houthi memiliki keberagaman di seluruh konflik yang pernah diketahui.

Para pemimpin Al-Houthi ini semacam mempunyai daerah kontrol atau kendali yang berbeda-beda atau *local area leaders* (LAL), disebut dalam bahasa Arab sebagai *qa' id maydani* atau bidang komandan. Hal itu juga menggambarkan lokasi kepala komandan Al-Houthi di seluruh daerah konflik (Barak, 2010). Pada masa konflik bersenjata, para komandan kelompok telah tinggal di daerah terpencil yang berkelanjutan dan dapat menginformasikan asumsi tentang dinamika internal kelompok. Dengan model seperti ini, yakni perencanaan dan pelaksanaan operasi tempur harian, LAL mempertahankan otonomi yang cukup besar dalam pelaksanaan operasi sehari-hari. Hal ini memungkinkan LAL untuk memulai pertukaran pusat komando sementara secara bersamaan dan membuat pusat komando Houthi mengambil "sendiri" keputusan-keputusan tersebut, mengandalkan prestise pribadi dan non-kekerasan persuasi untuk mempertahankan loyalitas.

Penyebaran pada lembaga sosial masyarakat ke struktur komando Al-Houthi lebih lanjut tercermin dalam jaringan keluarga yang mengakar pada organisasi Houthi. Sebagai contoh, Yusuf al-

Madani, yang menikahi salah seorang puteri Husain, berfungsi sebagai LAL. Jaringan yang seperti ini di yakini oleh Houthi sangat efektif, sehingga jalannya komunikasi antara pimpinan dan bawahan benar-benar efektif. Pola yang digunakan oleh Al-Houthi membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Memang ada kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem seperti ini, namun sejauh ini sistem ini menguntungkan bagi Al-Houthi. Pernikahan ini mengikat dia ke dalam keluarga Houthi dan jaringan yang luas yang terkait dengannya. Demikian pula, saudara Yusuf, Taha al - Madani, juga berfungsi sebagai komandan Houthi. Taha al-Madani mungkin memiliki setidaknya satu isteri. Contoh dari keluarga al-Madani peran dalam struktur perintah Houthi menunjukkan bahwa otoriter kehadiran dan pengaruh dari komandan Houthi utama tidak hanya mustahil dan tidak menarik, mengingat keterbatasan fisik dan sosial, tetapi juga sebagian besar tidak perlu karena prestise lokal dan ikatan organik yang lazim dalam organisasi.

Aspek-aspek material konflik ini memperkuat otonomi daerah dalam rubrik luas dan menyebabkan kesetiaan kepada Houthi. Pertama, ketersediaan berbagai senjata di Sa'da governorate menghilangkan kebutuhan untuk ketergantungan senjata, pengadaan amunisi dan penyaluran strategi. Aspek sumbangan lebih lanjut disorot oleh klaim yang dibuat dalam laporan pemerintah Yaman dan pekerja bantuan Internasional, bahwa Hussein al-Al-Houthi telah mengumpulkan zakat dan pajak Islam. Transregional dan dimensi

transnasional ekonomi Sa'da membuka berbagai saluran perdagangan baik itu yang sah maupun terlarang seperti penyelundupan, sehingga barang juga dapat diimpor ke governorate melalui aktor luar. Namun, Impor seperti itu akan tidak perlu untuk pemberontak Al-Houthi mengingat ketersediaan situs penyimpanan lokal dan organisasi Al-Houthi akan membuat mereka tereksplotasi. Karena itu, perlawanan Al-Houthi dapat menopang dirinya melalui metode pengadaan lokal daripada jaringan distribusi *top-down* atau hirarki.

2) Senjata dan Taktik Kelompok Al-Houthi

Sudah sewajarnya apabila kelompok seperti Al-Houthi identik dengan keberadaan senjata. Apalagi jika melihat fenomena di Timur Tengah bahwa begitu mudahnya senjata beredar di masyarakat. Perdagangan senjata di Yaman biasanya berada di pasar Suq al-Talh dan pasar lainnya, seperti yang di Ma'rib, pemerintah Yaman mengatakan pasar senjata tersebut telah ditutup pada awal tahun 2004. Namun, fakta menunjukkan bahwa pedagang senjata menjual dagangannya sampai pada saat konflik pecah.

Pemerintah Yaman sebenarnya telah melakukan berbagai usaha guna melakukan pencegahan terhadap maraknya peredaran senjata di Yaman, terutama di kalangan Al-Houthi. Konvoi kendaraan militer sering dilakukan guna patroli mengawasi peredaran senjata, dan tak jarang pasukan pemerintah berhasil menyita senjata yang ilegal di pasaran. Pemerintah Yaman juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai

pihak, yakni dengan pemerintah Arab Saudi yang berwenang di daerah perbatasan, lalu pengembangan *Yaman Coast Guard* dengan bantuan AS dengan tujuan memperketat ketersediaan senjata-senjata yang melalui pedagang tradisional (Barak, 2010). tentara Yaman juga menjual peralatan militer kepada pejuang Al-Houthi. Hal ini dilakukan oleh tentara Yaman sepenuhnya untuk mendapatkan uang tunai. Transaksi terlarang ini berasal dari transfer individu ke kekuatan pemerintah Yaman, kumpulan senjata yang lebih besar datang melalui tangan pemerintah Yaman, langsung ke dalam gudang Al-Houthi. Dalam kasus ini, Komandan yang berada lapangan atau pasokan sepanjang rute transportasi, memiliki kemudahan stok dari pemerintah Yaman. Kebanyakan transaksi ini menyediakan senjata ke perantara yang kemudian sebagian dari mereka menyampaikan pesannya ke komandan Al-Houthi. Kerjasama terlarang ini membuat pemerintah Yaman semakin sulit untuk menumpas gerakan Al-Houthi.

Dalam melaksanakan aksinya, tentu Al-Houthi tidak asal bertempur. Strategi yang matang dan persenjataan yang memadai serta di dukung dengan militansi, membuat gerakan A-Houthi sangat sulit untuk di tumpas oleh pemerintah Yaman. Berbagai aksi yang dilakukan Al-Houthi sangat membuat repot pemerintah Yaman. Basis yang kuat dari gerakan ini semakin membuat gerakannya sulit dihentikan oleh pemerintah. Apa yang dimiliki oleh Al-Houthi sebenarnya bukan hanya berasal dari internal Al-Houthi dan negeri

Yaman, namun di sinyalir ada bantuan dari negara lain terhadap gerakan Al-Houthi. Iran adalah negara yang disinyalir memberikan bantuan kepada Al-Houthi selama berkonflik dengan pemerintah Yaman (Tim Redaksi b, 2009).

Keterlibatan Iran dalam konflik antara Al-Houthi dengan pemerintah Yaman di bawah pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh memungkinkan Al-Houthi memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar menentang pemerintah. Dugaan keterlibatan Iran sudah mencuat sejak meletusnya perang pertama antara Al-Houthi dengan pemerintah Yaman tahun 2004. Al-Houthi diduga mendapat bantuan finansial dan pelatihan militer dari Iran guna melakukan perlawanan terhadap pemerintah Yaman. Dugaan ini bukannya tanpa dasar, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bukti yang kuat bahwa ada campur tangan Iran dalam kekuatan Al-Houthi, yang paling kuat adalah dari senjata yang digunakan oleh Al-Houthi memiliki kesamaan dengan senjata yang digunakan oleh militer Iran. Dokumen dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Yaman menunjukkan bahwa Iran memberikan bantuan kepada Al-Houthi dalam beberapa aspek yaitu dukungan media Iran, Finansial dan perekrutan, pelatihan militer serta persenjataan (Tim Redaksi b, 2009).

Banyak bukti kenapa Iran dituduh menyupport persenjataan kepada Al-Houthi. Bukti pertama adalah ketika pemerintah mengadili beberapa anggota Al-Houthi yang mengaku bahwa mereka menggunakan senjata dari Iran, dan barang

bukti berupa senjata yang pemerintah rampas dari sebuah gudang senjata Al-Houthi memperlihatkan bahwa senjata tersebut merupakan senjata buatan Iran (Tim Redaksi c, 2009). Melalui bukti-bukti inilah pemerintah Ali Abdullah Saleh mengklaim bahwa Iran merupakan kekuatan di balik kelompok Al-Houthi. Kunci dari eksistensi Al-Houthi selama ini merupakan dukungan penuh dari Iran yang ingin melebarkan faham Syiah, begitu tuduhan yang dialamatkan oleh Presiden Ali Abdullah Saleh.

Respon Pemerintah Yaman Terhadap Eksistensi Kelompok Pemberontak Al Houthi

Pada tahun 2009 Presiden Ali Abdulloh Saleh menyatakan bahwa kelompok al-Houthi dan pendukungnya harus di berangus hingga tuntas sampai bersih. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Yaman mengeluarkan kebijakan operasi bumi hangus untuk menumpas Al-Houthi dan pendukungnya di seluruh Sa'ada dan sekitarnya. Namun sebelum melancarkan operasi bumi hangus, pemerintah Yaman melalui Presiden Ali Abdullah Saleh terlebih dulu menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan Amerika Serikat dan Saudi Arabia guna membantu memerangi Al-Houthi.

Amerika serikat memiliki kepentingan yang besar akan Yaman, begitu juga sebaliknya. Pemerintah Yaman membutuhkan bantuan Amerika guna memerangi keolompok Al-Houthi, sementara pemerintah Amerika Serikat ingin memerangi AQAP (*Al Qaeda in the Arabian Peninsula*). Untuk itu pemerintah Yaman menjalin kerjasama yang intensif dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa dengan menyelesaikan masalah-masalah Yaman akan membuat kepentingan Amerika Serikat menjadi prioritas. Maka yang harus dilakukan adalah membantu pemerintah Ali Abdullah Saleh menyelesaikan masalah dalam negerinya, yakni memerangi untuk menghentikan pemberontakan (Sharp, 2009). Pemerintah Amerika Serikat menganggap Al-Houthi memiliki keterkaitan dengan AQAP, maka program perang Amerika tidak hanya untuk AQAP tapi juga untuk Al-Houthi. Bantuan yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk pemerintah Yaman dalam memerangi Al-Houthi antara lain bantuan finansial, bantuan militer berupa senjata dan alat-alat perang, bantuan strategi dan logistik dan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan paska perang (Sharp, 2009).

Saudi Arabia merupakan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Yaman di sebelah utara, pas tepat berbatasan dengan Sa'ada tempat berlangsungnya konflik. Tidak heran apabila Saudi Arabia khawatir akan daerah teritorinya terkena dampak langsung konflik. Keterlibatan langsung Saudi Arabia dalam perang sipil Yaman terjadi pada tahun 2009. Pemerintah Yaman sadar akan letak strategis Saudi Arabia untuk memerangi kelompok Al-Houthi. Oleh karena itu pemerintah Yaman dan kerajaan Saudi Arabia menjalin kerja sama guna memerangi Al-Houthi. Pada November 2009, dengan alasan melindungi teritorinya Saudi Arabia mengerahkan kekuatan militernya untuk menyerang Al-Houthi.

Penyerangan dilakukan di daerah perbatasan dengan menggunakan tank, artileri dan pesawat tempur. Serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan basis-basis perlindungan Al-Houthi, tapi juga untuk memastikan Al-Houthi mundur dari wilayah Saudi Arabia.

Operasi bumi hangus adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menumpas gerakan kelompok Al-Houthi hingga ke dasarnya. Pemerintah Yaman dalam operasi ini menggunakan kekuatan militer secara besar-besaran, bahkan pemerintah Yaman sendiri menyebut operasi ini sebagai operasi penghabisan terhadap kelompok Al-Houthi. Operasi bumi hangus resmi di mulai pada 11 Agustus 2009, pada saat itu militer pemerintah Yaman menyerang pusat pertahanan kelompok Al-Houthi di beberapa distrik. Serangan tersebut menggunakan persenjataan tempur berat dan berlangsung kurang lebih selama tiga minggu. Upaya besar-besaran yang dilakukan militer Yaman ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sesuai dengan keinginan Presiden Ali Abdullah Saleh. Tiga minggu setelah operasi besar-besaran terhadap kelompok Al-Houthi dimulai, pemerintah meminta gencatan senjata dan penyerahan tawanan yang masih di tawan oleh Al-Houthi, namun permintaan pemerintah Yaman ini ternyata tidak di gubris oleh Al-Houthi.

Upaya Pemerintah Yaman Menghentikan Perang dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi melalui Jalan Perundingan Damai dan Gencatan Senjata

Upaya Pemerintah Yaman pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh untuk memberantas Kelompok Pemberontak Al Houthi dengan melakukan pendekatan militer ternyata tidak mampu menghentikan gerakan tersebut. Selama perang yang terjadi selama kurang lebih enam tahun tersebut membuat situasi keamanan di Yaman menjadi tidak stabil. Dalam perang tersebut Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh juga mengalami kerugian, berbagai kemenangan – kemenangan yang diperoleh oleh Kelompok Pemberontak Al Houthi membuat kelompok tersebut berhasil menguasai bangunan – bangunan milik negara dan menutup jalan masuk menuju Yaman Utara.

Perang yang berlangsung berlarut – larut di Yaman tersebut, akhirnya menimbulkan upaya dari Pemerintah Yaman untuk mengakhiri konflik dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi. Upaya pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Yaman pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh untuk menghentikan perang dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi adalah melakukan perundingan dengan kelompok tersebut. Presiden Ali Abdullah Saleh terpaksa melibatkan dan meminta delegasi dari Qatar untuk masuk menjadi mediator. Perundingan antara Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2008 dan upaya mediasi yang dilakukan delegasi dari Qatar tersebut menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun

kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Pada tahun 2009 untuk ke enam kalinya tentara Pemerintah Yaman dan Kelompok Pemberontak Al Houthi bertemu dalam baku tembak yang terjadi di Propinsi San'a.

Memperkuat upaya kesepakatan gencatan senjata antara pihak Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi, maka kedua belah pihak kembali dibawa ke meja perundingan yang diselenggarakan di Doha pada tanggal 19 Desember 2009 (Zurich, 2002). Pemimpin Kelompok Pemberontak Al Houthi di Yaman Utara mengatakan menerima tawaran pemerintah Yaman untuk perundingan dan gencatan senjata asalkan pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh mengakhiri perang terhadap mereka, yang dianggap sangat tidak adil. Pada perundingan damai yang dilakukan di Doha, Pemerintah Yaman mengajukan enam syarat kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi. Keenam syarat yang dilajukan tersebut adalah:

- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk menarik pasukannya dari bangunan milik negara,
- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk membuka kembali jalan – jalan di utara Yaman,
- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk mengembalikan senjata yang dirampas oleh Kelompok Pemberontak Al Houthi kepada Pemerintah Yaman,

- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk membebaskan seluruh tawanan, termasuk tawanan warga Arab Saudi,
- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk mengosongkan pos – pos militer di wilayah pegunungan, dan
- Meminta kepada Kelompok Pemberontak Al Houthi untuk menghentikan penyerangan terhadap tentara Arab Saudi yang dilakukan oleh kelompok pemberontak itu sendiri (Rizal, 2010).

Awalnya Kelompok Pemberontak Al Houthi hanya menerima lima poin untuk gencatan senjata yang disampaikan Pemerintah Yaman setelah Pemerintah Yaman mengakhiri agresi militernya (Tim Redaksi a, 2009). Namun lima persyaratan yang disetujui oleh Kelompok Pemberontak Al Houthi ini mendapatkan penolakan dari Pemerintah Yaman. Pemerintah Yaman juga menginginkan Kelompok Pemberontak Al Houthi menerima persyaratan keenam yaitu menghentikan penyerangan terhadap tentara Arab Saudi di perbatasan Yaman (Zurich, 2002). Menurut pendapat dari Kelompok Pemberontak Al Houthi bahwa pasukannya akan menarik diri dari seluruh wilayah perbatasan Yaman yang telah diduduki sejak bulan Nopember 2008. Namun tentara Arab Saudi yang terus menerus melakukan penyerangan terhadap Kelompok Pemberontak Al Houthi membuat kelompok ini juga melakukan perlawanan untuk menahan agresi militer dari pihak Arab Saudi. Kelompok Pemberontak Al Houthi akan melaksanakan point terakhir dalam perjanjian nasional yang telah disepakati dengan

Pemerintah Yaman apabila Arab Saudi tidak mencampuri urusan dalam negeri Yaman. Selain itu, Kelompok Pemberontak Al Houthi juga menyatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi harus meminta maaf kepada Yaman dan rakyat terkait dengan agresi militer mereka di Yaman (Zurich, 2002).

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Yaman antara pemerintahan Ali Abdullah Saleh dengan kelompok Pemberontak Al-Houthi menyebabkan terjadinya enam kali bentrok senjata antara kedua belah pihak tersebut. Awal mula konflik internal itu terjadi adalah Pemerintah Yaman di selatan menuding kelompok Pemberontak Al-Houthi ingin menggulingkan sistem pemerintahan dan menggantikannya dengan sistem Imâmah. Sedangkan kelompok Pemberontak Al-Houthi yang didukung oleh penduduk Yaman Utara menuding pemerintahan Yaman yang sejak bergabungnya antara Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tanggal 22 Mei 1990 dan dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh melakukan diskriminasi dan marginalisasi ekonomi kawasan Sa'da di utara Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman tersebut semakin diperparah dengan adanya campur tangan tentara Arab Saudi yang ikut membantu pemerintah Yaman dalam menghadapi kelompok Pemberontak Al-Houthi. Masalah lainnya adalah hampir semua warga di Yaman bebas memegang senjata. Senjata yang diperoleh oleh kelompok Pemberontak Al-Houthi adalah hasil dari rampasan

dari senjata militer Yaman pada saat terjadi bentrokan.

Dalam usaha mencegah semakin parahnya kondisi konflik di wilayah negara Yaman, maka pemerintah Yaman berupaya untuk menghentikan perang tersebut melalui jalur perundingan. Pada perundingan pertama yang dilakukan di Doha antara Pemerintah Yaman pimpinan Ali Abdullah Saleh dengan kelompok Pemberontak Al Houthi sepakat melakukan gencatan senjata. Pemerintah Yaman mengajukan enam persyaratan yaitu meminta kepada kelompok Pemberontak Al-Houthi untuk menarik pasukannya dari bangunan milik negara, membuka kembali jalan-jalan di utara Yaman, mengembalikan senjata yang dirampas oleh kelompok Pemberontak Al-Houthi kepada pemerintah Yaman, membebaskan seluruh tawanan termasuk warga Arab Saudi, mengosongkan pos-pos militer di wilayah pegunungan, dan menghentikan penyerangan terhadap tentara dan wilayah Arab Saudi yang dilakukan kelompok Pemberontak Al-Houthi.

Konflik internal atau dalam negeri yang terjadi di suatu negara seperti yang terjadi di negara Yaman ini dampaknya bukan hanya akan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri, namun juga mengancam kehidupan warga sipil yang ada didalamnya. Terlebih jika konflik tersebut disertai adanya intervensi dari negara lain seperti Arab Saudi dengan tujuan membantu salah satu pihak yang terlibat konflik. Situasi ini justru akan mengundang kemarahan dari salah satu pihak dan sekaligus akan semakin memperparah kondisi

konflik tersebut. Dari konflik yang terjadi antara pemerintah Yaman dengan Al-Houthi bisa diambil pelajaran bahwa tidak selamanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik atau meredam munculnya perlawanan dari kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dilakukan dengan cara kekerasan atau tindakan militer. Upaya yang pada akhirnya dapat menyelesaikan konflik tersebut adalah dilakukan dengan cara damai atau melakukan perundingan dengan pihak pihak yang terlibat konflik seperti Pemerintah Yaman yang meminta bantuan Qatar sebagai mediator dalam perundingan dengan Kelompok Pemberontak Al Houthi.

Daftar Pustaka

BUKU

- Miall, Hugh. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darby, John. Mag Ginty, Roger. 2003. *Contemporary Peacemaking Conflict, Violence and Peace Proces*. New York: Palgrave Macmillan.

INTERNET

- Amir, Faisal. 2011. *Menguak Konflik Yaman dan Dampaknya bagi Dunia Islam*: : <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/menguak-konflik-yaman-dan-dampaknya-bagi-dunia-islam.htm>. [12 Maret 2012]
- Barak A. Salmoni. 2010. *Regime and Periphery in Northern Yemen The Huthi Phenomenon*. <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/> [8 Maret 2015]
- Djauhari, Ahmad. 2012. *Sebelum Meninggalkan Pemerintahan, Ali Abdullah Shalih Menghancurkan Perekonomian di Yaman*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/05/20/sebelum->

- [meninggalkan-pemerintahan-ali-abdullah-halih-menghancurkan-perekonomian-di-yaman](#) [6 Oktober 2013].
- Faqih, Usman. 2008. *Siapa Suku Houthi di Yaman?*.
http://www.sabili.co.id/index.php?option=com_content&view=articles&id=771:siapa-suku-houthi-di-yaman&catid=85:lintas-dunia&Itemid=284 [23 Agustus 2013].
- Husen, Yunus. 2009. *Upaya Pemberontak Houthi Untuk Dirikan Negara Syi'ah di Yaman Utara*".
<http://www.erasuslim.com/berita/analisa/upaya-pemberontak-houthi-untuk-mendirikan-negara-syiah-di-yaman-utara.htm>. [11 Januari 2013].
- Izzudin, Ahmad. 2010. *Yaman: 100 Orang Tewas Akibat Perang pemerintah-Syi'ah*".
<http://www.erasuslim.com/berita/dunia/yaman-100-orang-tewas-akibat-perang-pemerintah-syiah.htm> [19 Juni 2013].
- Muhammad. 2014. Rekam Jejak Kelompok Al Houthi di Yaman.
<http://liputanislam.com/berita/fokus/rekam-jejak-kelompok-al-houthi-di-yaman-bagian-12/> [8 maret 2015].
- Tim Redaksi. 2009a. *Presiden Yaman Umumkan Gencatan Senjata dengan Pemberontak Syiah*".
<http://antaranew.com/berita/126592011/presiden-yaman-umumkan-gencatan-senjata-dengan-pemberontak-syiah.html> [7 Juni 2013].
- Tim Redaksi. 2009b. Iran targeting security of Yemen and Saudi Arabia.
<http://www.almotamar.net/en/6950>. Htm. [15 Mei 2014]
- Tim Redaksi. 2009c. Intel: Houthi, Iran, Hizbulloh dalam pertemuan rahasia.
<http://www.suaramedia.com/timur-tengah/2009/12/14/intel-houthi-iran-hizbullah-dalam-pertemuan-rahasia>. [15 Maret 2015]
- Rizal, Mohammad. 2010. *Pemerintah Yaman dan Gerilyawan berembuk di Qatar*".
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/08/25/131907-pemerintah-yaman-dan-gerilyawan-berembuk-di-qatar> [13 Juni 2013].
- Taufik, Husen. Yemen Central Statistics Organization 2004 census data release, 2004. As of May 27, 2009.
<http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=234> [8 April 2013]
- Steven, John. Yemen Army Air Raid Kills 80 Civilians: Witnesses," *al-Arabiya.net*, September 17, 2009. As of January 20, 2010.
<http://www.alarabiya.net/articles/2009/09/17/85222.html> [3 Maret 2013].
- Worth, Robert F., "Yemen's Government Agrees to a Cease-Fire with Rebel Forces," *New York Times*, February 11, 2010. As of February 15, 2010.
<http://www.nytimes.com/2010/02/12/world/middleeast/12yemen.html?scp=1&sq=houthi&st=cse> [3 Mei 2013].
- Zurich, Elizabeth. Yemen to Establish Coast Guard with U.S. Assistance," *MarineLink.com*, October 18, 2002. As of January 20, 2010. Diakses pada:
<http://marinelink.com/Story/Yemen+to+Establish+Coast+Guard+with+U.S.+Assistance-9687.html> [15 Januari 2014].

E BOOK

Sharp. M. Jeremi. 2009. *Yemen: Background and U.S. Relations*.
<http://www.fas.org/sgp/mideast/RL41270.pdf>. [15 Maret 2013].